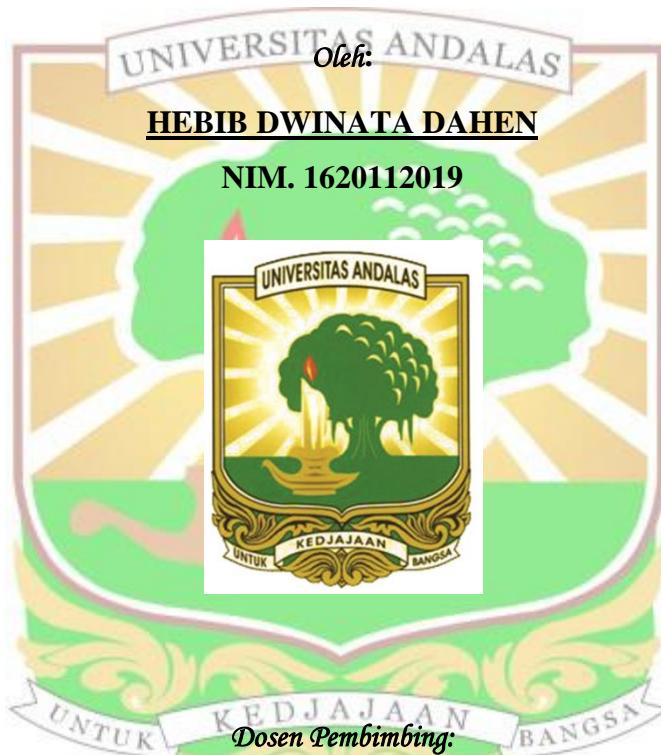


**PENGELOLAAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI PASCA  
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 36/PUU-X/2012 DALAM  
RANGKA MENCAPAI KEMAKMURAN RAKYAT**

**TESIS**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat  
Oleh: Mencapai Gelar Magister Hukum*



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2020**

**PENGELOLAANUSAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI PASCA  
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 36/PUU-X/2012 DALAM  
RANGKA MENCAPI KEMAKMURAN RAKYAT**

**Hebib Dwinata Dahlen, 1620112019, Magister Ilmu Hukum Universitas  
Andalas, 136 Halaman, Tahun 2020**

**ABSTRAK**

Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa terdapat 9 Pasal yang inkonstitusional dalam Undang-undang Migas. Pasca putusan MK pemerintah dianggap tidak konsisten dalam melaksanakan putusan MK. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah pengelolaan minyak dan gas bumi sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012, 2) Bagaimanakah pengelolaan usaha hulu minyak dan gas bumi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 dalam rangka mencapai kemakmuran rakyat, 3) Bagaimanakah perspektif dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 terhadap pengelolaan usaha hulu minyak dan gas bumi dalam rangka mencapai kemakmuran rakyat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi dokumen. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 1) pengelolaan Migas sebelum Putusan MK dilakukan oleh BP Migas, dimana BP Migas mewakili negara dalam melakukan hubungan perdata dengan badan usaha atau badan usaha tetap 2) pengelolaan usaha hulu migas tidak dapat dipisahkan dari konsep hak menguasai negara, tindakan privat pemerintah dan tujuan Pasal 3 UUD 1945 yakni mencapai kemakmuran rakyat. oleh karena itu pengelolaan usaha hulu migas dikembalikan pada pemerintah dengan membentuk SKK Migas, namun SKK migas memiliki kesamaan dengan BP Migas yang dinyatakan inkonstitusional oleh MK sebelumnya 3) Perspektif dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 terhadap pengelolaan minyak dan gas bumi yaitu kelembagaan pengelolaan migas tidak memiliki perbedaan yang berarti dengan yang terdahulu, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum belum dapat tercapai.

**Kata Kunci:** Pengelolaan Usah Hulu Migas, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012, Kemakmuran Rakyat.

**BUSINESS MANAGEMENT OF OIL AND GAS UPSTREAM AFTER THE CONSTITUTIONAL COURT DECISION NO. 36/PUU-X/2012 IN ORDER TO ACHIEVE YHE PROSPERITY OF THE PEOPLE**

***Hebib Dwinata dahan, 1620112019, Master of Law Andalas University,  
118 Pages, Year 2020***

**ABSTRACT**

The Constitutional Court stated that there were 9 articles that were unconstitutional in the Oil abd Gas Law. After the constitutional Court's decision the governments was deemed incinsitent in earring out the constitutional Court's decision. The formulation of the problem in this research ia 1). How is the management of oil and gas before the constitutional courth decision Number 36/PUU-X/2012, 2). How is the management of oil and gas upstream businesses after the constitutional courth decision number 36/PUU-X/2012 in order to achieve people's person prosperity, 3). What is the perspective of the constitutional courth decision number 36/PUU-X/2012 on the management of upstream oil and gas businesses in order to achieve people's prosperity. Type of the reseach used is normative legal research approach to legislation and conceptual approaches. The legal material used is primary legal materials, secondary law materials and teriary legal materials. Th technique of collecting the legal material used is study documents. The technique of analysis of legal materials used be concluded that 1). Oil and gas management prior to the birth of the constitutional courth decision is carried out by the oil and gas implementing agency, where the oil and gas imp;ementing agency represents the country in conducting civil relations with bussines entities 2). The management of upstream oil and gas bussines the management of upstream oil and gas business cannot be separated from the concept of the right to control the state, private action of the government and purpose of article 3 of the constitution wich is to achieve the prosperity of the people. There fore that management of upstream oil and gas business is returned to the government by forming SKK Migas which was declared unconstitutional b the previous constitutional court, 3). Perspective of the constitutional courth ruling number 36/PUU-X/2012 regarding the management of oil and gas oil and gas management institutions do not have significant differences from the previous ones, legal justice and legal benefits have not yet been achieved.

**Keywords:** *Busines management Of Oil and gas Upstream, Decision of the Constitutional Court Number 36 / PUU-X / 2012, Prosperity of the People.*